

Menabur Janji Menuai Simpati: Politik Pendidikan Dalam Kampanye Pilkada Kabupaten Dompu Tahun 2015

Ilyas Yasin[#], Enung Nurhasanah^{*}

[#] Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Yapis jln. Syekh Muhammad, Bali Satu, Swete, Kab. Dompu NTB 84271
Email: ilyasdompu73@yahoo.co.id

^{*} Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Yapis jln. Syekh Muhammad, Bali Satu, Swete, Kab. Dompu NTB 84271
Email: enungnazwa@gmail.com

Abstrak - Dalam setiap pertarungan perebutan jabatan politik seperti kepala daerah, isu pendidikan merupakan salah satu isu yang sering diusung para calon dalam meraih simpati dan dukungan publik. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu, masalah pendidikan menarik bukan hanya karena persoalan ini masih krusial dihadapi kabupaten Dompu, tapi juga fakta bahwa para calon memandang dunia pendidikan sebagai basis dukungan dan legitimasi politik cukup penting dalam setiap kampanye Pilkada di kabupaten Dompu. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mendorong para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya pemerintah Kabupaten Dompu, agar menempatkan sektor pendidikan berada di arus utama dalam pembuatan kebijakan pembangunan di daerah. Penelitian ini juga dapat membantu para calon bupati Dompu yang akan datang dalam merumuskan tema kampanye, program maupun kebijakan pendidikan yang akan diusungnya. Sedangkan target khusus penelitian ini adalah diketahuinya politik atau kebijakan pendidikan dari masing-masing calon bupati Dompu, bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang akan dijalankan, seberapa penting isu pendidikan dalam tema-tema kampanye para calon, bagaimana mereka memandang isu pendidikan di antara isu-isu pembangunan lainnya, dan bagaimana cara mengeksekusi kebijakan pendidikan yang telah disusun jika terpilih nantinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara deksriptif-kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain belum menjadi isu utama dalam kampanye Pilkada, penyelesaian masalah pendidikan yang ditawarkan para calon juga masih bersifat parsial serta mengandalkan pendekatan kesejahteraan.

Kata Kunci — *Politik, Pendidikan, Pilkada.*

I. PENDAHULUAN

Dalam pentas politik modern pendidikan seringkali menjadi salah satu isu strategis yang digunakan oleh para elit untuk meraih dan memobilisasi dukungan publik dalam ajang perebutan jabatan-jabatan politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu didasarkan pada fakta bahwa pendidikan tidak sekadar berfungsi mengembangkan potensi individu-individu dalam masyarakat tapi juga secara langsung ikut memengaruhi kualitas kehidupan negara secara luas (Razik&Swanson, 1995). Itulah sebabnya setiap kebijakan pendidikan merefleksikan pilihan-pilihan politik, tradisi, nilai dan konsepsi masa depan sebuah negara (UNESCO, 1972: 170). Bahkan menurut Olsen dkk (Tilaar dan Nugroho, 2008: 267) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keamanan, keberlanjutan dan eksistensi dunia global. Sebagai salah satu aspek yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak maka kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan tentu akan ikut memengaruhi persepsi dan pilihan seseorang dalam menyalurkan aspirasi politik yang dimilikinya dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

Pilkada secara langsung yang dilakukan sejak 2004 telah membawa beberapa implikasi mendasar dalam sistem perpolitikan di Indonesia baik dari aspek rekrutmen elit maupun isu-isu kampanye politik di daerah. Dari aspek rekrutmen, studi Pramusinto (2010: 307-308) menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya melahirkan kepemimpinan yang inovatif tapi juga sumber-sumber rekrutmen kepemimpinan yang lebih bervariasi. Jika pada masa Orde Baru kepemimpinan didominasi kalangan militer dan birokrat maka sejak otonomi daerah pola kepemimpinan berasal dari berbagai kalangan seperti dunia usaha (Kota Yogyakarta dan Gorontalo), pendidik (Jembrana, Blitar, Bantaeng, Bojonegoro), aktivis politik (Blitar, Kebumen, Solo), birokrat muda (Solok), tokoh perempuan (Kebumen) dan kalangan profesional (Kota Bandung). Sedangkan dari aspek isu kampanye, Pilkada telah menyebabkan isu-isu kampanye para calon kepala daerah memiliki dimensi kedekatan (*proximity*) dengan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat pemilih, sehingga setiap pilihan isu kampanye yang disampaikan para kandidat akan turut memengaruhi tingkat elektabilitas kandidat, termasuk isu-isu di bidang pendidikan.

Pada 2015 secara nasional terdapat 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten melakukan Pilkada secara serentak (*Suara KPU*, edisi Maret-April 2015). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri terdapat tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak yakni Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara (*Jurnal KPU Dompu*, Juli-Agustus 2015). Meskipun Pilkada digelar pada awal Desember 2015, namun sejak pertengahan tahun 2014 geliat politik kabupaten Dompu sudah mulai bermunculan. Beberapa kandidat yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada melakukan berbagai upaya untuk menarik simpatik masyarakat baik secara terbuka maupun tersamar, misalnya melalui berbagai acara sosial kemasyarakatan (seperti pernikahan), pertemuan-pertemuan informal, mensponsori berbagai kegiatan perlombaan olahraga, maupun dengan menggunakan media dan alat seperti spanduk, baliho dan kalender. Berbagai upaya tersebut tidak lain dimaksudkan untuk membangun citra positif guna meraih dukungan publik, baik yang dilakukan calon pendaftar baru maupun petahana (*incumbent*).

Di Kabupaten Dompu maupun NTB umumnya, secara politik isu pendidikan menjadi menarik karena berhubungan dengan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Di tingkat provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih sangat rendah, yakni menempati urutan 32 dari 33 provinsi dengan indeks 63 pada tahun 2007. Posisi tersebut belum bergeser sampai tahun 2009. Tahun 2005 NTB bahkan merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki proporsi angka buta huruf yang relatif tinggi yaitu 18,27% (Sulistyastuti, 2007: 19). Kendati Angka Partisipasi Kasar (APK) melebihi 100% dan Angka Partisipasi Murni (APM) cukup tinggi (SD/MI 95,15% tahun 2002/2003, SMP/MTs 76,15% pada 2006) tapi IPM NTB dalam tiga tahun terakhir tetap rendah yaitu 60,6 (2004), 62,4 (2005) dan 63 (2006). Peringkat ini berada di bawah rata-rata IPM nasional pada tahun yang sama yaitu 68,7; 69,4; dan 70,1 (BPS NTB, 2008). Demikian juga, meski Angka Melek Huruf (AMH) cukup tinggi yaitu mencapai 80,1% untuk usia di atas 15 tahun, tapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 6,7 tahun atau setingkat kelas satu SMP. Angka *drop out* (DO) juga cukup tinggi terutama di tingkat SD yaitu 29.724 siswa (5,51%), sedangkan di SMP 4,76%, SMA 4,23% dan SMK 6,31%.

Di Kabupaten Dompu, isu pendidikan paling tidak menghadapi dua tantangan berat. *Pertama*, masih tingginya angka kemiskinan yakni mencapai 57.531 jiwa (27,87%) dari keseluruhan penduduk 213.185 jiwa sehingga menempatkan Kabupaten Dompu berada di urutan kedua dari sembilan kabupaten/kota

yang berpenduduk miskin di Provinsi NTB. *Kedua*, angka buta aksara untuk usia 10 tahun ke atas juga tergolong tinggi yaitu 20,17% tahun pada 2006. Angka Melek Huruf mencapai 82,80%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,00 tahun dan *drop out* (DO) 4,88%. Kondisi ini menyebabkan IPM Kabupaten Dompu pada 2007 berada di urutan 5 tingkat provinsi atau urutan 424 secara nasional.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ke depan berbagai persoalan pendidikan senantiasa menjadi isu krusial yang akan dihadapi oleh elit yang memimpin Kabupaten Dompu. Oleh karena itu, menarik untuk mencermati isu-isu pendidikan dalam kampanye Pilkada Kabupaten Dompu 2015. Meski selama ini janji-janji kampanye seringkali tidak memiliki konsekuensi hukum, namun betapapun bahwa janji kampanye menjadi cermin dari visi dan aspirasi politik dari calon kepala daerah bersangkutan. Faktanya, terdapat beberapa daerah yang tergolong sukses membuat inovasi di bidang pendidikan sehingga kualitas kehidupan masyarakatnya dapat ditingkatkan.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana politik pendidikan dalam kampanye Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2015. Apakah bidang pendidikan menjadi perhatian para calon bupati, bagaimana mereka memandang isu pendidikan dalam kerangka kebijakan pembangunan di daerah jika kelak terpilih? Seberapa pentingkah posisi pendidikan dibandingkan sektor-sektor lain seperti kesehatan, ekonomi, pertanian dan lain-lain? Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan selama lima bulan masa kampanye Pilkada di Kabupaten Dompu yakni 27 Agustus-5 Desember 2015. Sasaran penelitian ini adalah seluruh calon atau pasangan calon bupati Dompu periode 2015-2020 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu serta yang melakukan kampanye dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Dompu tahun 2015.

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah wilayah yang menjadi tempat kampanye para pasangan calon bupati Dompu. Terdapat 8 kecamatan di Kabupaten Dompu yakni Kecamatan Dompu, Woja, Pajo, Hu'u, Manggelewa, Kempo, Kilo dan Pekat. Data primer diperoleh melalui observasi saat para pasangan calon maupun tim sukses melakukan kampanye, pidato maupun acara debat antar pasangan calon yang difasilitasi KPUD, di samping melalui publikasi media massa seperti pemberitaan di koran dan siaran televisi lokal. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui berbagai bahan bacaan dan sumber yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (1985) yang terdiri atas tiga aktivitas yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

II. PEMBAHASAN

A. Dari Pengusaha hingga Pengacara: Profil Pasangan Calon Bupati Dompu

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Dompu Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 terdapat empat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 yakni (a) Drs. H. Bambang M. Yasin-Arifuddin, SH yang diusung Partai Nasdem (3 kursi), Partai Gerindra (3 kursi) dan Partai Hanura (1 kursi), (b) Syafruddin, SAP-Rafiuddin, SE yang diusung PAN (4 kursi) dan PKB (3 kursi); (c) H. Mulyadin, SH, MH-Kurniawan Ahmadi yang diusung PKS (3 kursi), PDI-P (3 kursi) dan Partai Demokrat (2 kursi) dan (d) H. Abubakar Ahmad, SH-Kisman, SH yang diusung PPP (3 kursi), Partai Golkar (2 kursi) dan PBB (3 kursi). Berdasarkan komposisi kursi partai politik di DPRD Kabupaten Dompu, keempat pasangan calon di atas masing-masing diusung oleh 7 kursi parpol (Paslon Bambang M. Yasin-Arifuddin dan Syafruddin-Rafiuddin) dan 8 kursi parpol (Mulyadin-Kurniawan Ahmadi dan Abubakar Ahmad-Kisman).

Dilihat dari latar belakang pekerjaan, keempat Paslon berasal dari profesi yang beragam yaitu politisi (Rafiuddin dan Kurniawan Ahmadi), birokrat (Syafruddin, Mulyadin), birokrat-pengusaha (Arifuddin), pengusaha-akademisi (Bambang M. Yasin), birokrat-politisi (Abubakar Ahmad) hingga pengacara-aktivis LSM (Kisman). Cawabup Rafiuddin misalnya, selain masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Dompu, juga mantan anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Dompu dua periode (2004-2009/2009-2014). Sedangkan Kurniawan Ahmadi adalah juga anggota DPRD Kabupaten Dompu dua periode (2009-2013/2014-2015) sekaligus pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten Dompu. Sebelum menjadi legislator Ahmadi pernah menjadi Kepala Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu (2005-2009).

Cabup Syafruddin merupakan seorang birokrat yang berkarir di Jakarta selama 23 tahun. Terakhir, ia memegang jabatan sebagai salah satu kepala bagian di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011-2015). Sedangkan Mulyadin adalah seorang birokrat yang telah memegang beberapa jabatan di Kabupaten Lombok Barat sejak 1992. Posisi terakhirnya adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Cawabup Arifuddin juga seorang birokrat di lingkungan Pemda Dompu. Jabatan tertinggi dalam karirnya adalah sebagai Camat Kempo pada 2010-2012 dan terakhir tercatat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu. Selain sebagai birokrat Arifuddin juga dikenal sebagai pengusaha bis antarkota di Kabupaten Dompu, generasi kedua yang meneruskan usaha keluarga yang dirintis orangtuanya. Adapun

pasangannya Cabup Bambang M. Yasin adalah seorang pengusaha kelapa sawit yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan Selatan. Sebelum terjun sebagai pengusaha Bambang M. Yasin juga pernah menjadi dosen pada dua perguruan tinggi swasta di Balikpapan (Tim Penyusun KPU Dompu, 2015). Pada 2010 Bambang M. Yasin mencoba peruntungan dan memenangkan Pilkada sebagai Bupati Dompu periode 2010-2015 berpasangan dengan Samsuddin M. Yasin. Kendati pernah memegang jabatan politik, namun Bambang M. Yasin tidak pernah bergabung atau menjadi pengurus aktif, apalagi memegang jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Hampir sama dengan Syafruddin, Cabup Abubakar Ahmad juga adalah seorang birokrat yang meniti karir cukup lama di Jakarta. Pada 2000 Abubakar Ahmad terpilih sebagai Bupati Dompu (2000-2005) dan terpilih kembali pada 2005-2007 berpasangan dengan Syaifurrahman Salman. Namun baru 2 tahun menjabat bupati, pada 2007 karir politiknya terhenti karena ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial sehingga jabatannya diteruskan wakilnya Syaifurrahman Salman (meski yang terakhir juga tersangkut kasus korupsi). Sebelumnya, Abubakar Ahmad juga pernah memegang jabatan sebagai ketua partai politik pendatang baru pada 2008, namun kiprahnya tidak begitu populer sampai kemudian mencalonkan diri kembali sebagai Cabup. Sedangkan pasangannya, Cawabup Kisman adalah seorang pengacara sekaligus aktivis muda LSM yang banyak berkiprah dalam sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari keempat Paslon di atas ternyata tak ada satu calon pun yang murni berasal dari dunia pendidikan.

B. Menebar Jargon Meraih Simpati

Dalam kampanye Pilkada Kabupaten Dompu, keempat Paslon yang bertarung memperkenalkan jargon tertentu kepada pendukung maupun masyarakat pemilih dalam bentuk singkatan, akronim maupun menggunakan istilah bernuansa lokal. Misalnya, Paslon Petahana H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin menggunakan singkatan "HBY-Arif". HBY merupakan singkatan dari nama H. Bambang M. Yasin, sedangkan "Arif" adalah nama panggilan dari Arifuddin. Tetapi dalam ungkapan sehari-hari masyarakat lebih sering menyebut HBY saja daripada HBY-Arif. Hal itu di samping singkatan HBY sudah lebih populer sebelumnya karena pernah menjadi bupati, juga penyebutan HBY tampaknya lebih efisien secara teknis kebahasaan khususnya bahasa lisan.

Berbeda dengan HBY-Arif, Paslon Syafruddin Yasin dan Rafiuddin H. Anas lebih memilih menggunakan terminologi lokal "*Lamba Rasa*" sebagai *brand*-nya. Dalam bahasa Bima "*Lamba*

Rasa” secara harfiah berarti “pulang kampung untuk bersilaturahmi”. Secara tekstual “*lamba*” berarti “mengunjungi” atau “pulang” sedangkan “*rasa*” artinya “kampung halaman”. Pada umumnya istilah tersebut digunakan oleh masyarakat Bima-Dompu untuk menggambarkan tradisi pulang bagi warga Bima-Dompu di perantauan. Sebagaimana halnya dengan tradisi “*pulang kampung*” dalam masyarakat Sumatera Barat khususnya Padang, “*lamba rasa*” umumnya dilakukan oleh masyarakat Bima setelah sukses di perantauan, meski dengan takaran makna “sukses” yang berbeda-beda. Tetapi “*lamba rasa*” bukan berarti pulang kampung untuk selamanya melainkan sekadar bertemu dengan orangtua, kerabat, teman, tetangga dan orang-orang terdekat kemudian kembali ke tempat perantauan.

Secara sosiologis “*lamba rasa*” secara implisit mengandung hasrat untuk ‘memamerkan’ berbagai kesuksesan yang diraih di kota atau daerah perantauan kepada masyarakat di kampung baik tentang pekerjaan, kekayaan, keluarga dan status sosial. Sedangkan secara antropologis, terminologi “*lamba rasa*” merefleksikan kesetiaan masyarakat Bima untuk tetap tersambung dengan akar tradisinya. Tetapi secara maknawi “*lamba rasa*” sebenarnya bermakna “pulang kampung untuk mengabdikan”. Hal itu sejalan dengan penjelasan Dedy Kusnaedi, salah seorang Tim Kampanye *Lamba Rasa*, saat kampanye di Desa Jambu Kecamatan Pajo tanggal 29 September 2015, yang menepis anggapan bahwa “*Lamba Rasa*” adalah sekadar datang lalu pulang ke kota. Menurutnya, esensi “*Lamba Rasa*” adalah mengunjungi desa dan dusun untuk melihat kebutuhan dan masalah yang dihadapi rakyat. Esensi “*Lamba Rasa*” adalah menyambung silaturahmi. Hal yang sama juga ditegaskan Tim Kampanye *Lamba Rasa* dalam beberapa kesempatan kampanye di tempat lain. Klarifikasi tentang esensi dan pengertian “*Lamba Rasa*” semacam itu tampaknya harus dilakukan Tim Kampanye *Lamba Rasa* untuk melawan opini yang dikembangkan sebagian pesaingnya (baca: kampanye negatif) yang meplesetkan “*Lamba Rasa*” menjadi “*Landa Rasa*” yang berarti “menjual kampung halaman”.

Pasangan H. Mulyadin dan Kurniawan Ahmadi menggunakan akronim “MULYA” untuk memudahkan ingatan publik terhadap pasangan ini. MULYA merupakan akronim dari nama Mulyadin dan Kurniawan Ahmadi. Sebagai medan pertarungan politik, pilihan terhadap suatu jargon, akronim atau singkatan tertentu bukanlah kebetulan semata melainkan telah diproyeksikan atau diharapkan memiliki efek politik terhadap masyarakat pemilih. Akronim MULYA tentu diharapkan dapat meraih simpati publik karena pasangan ini hendak menegaskan atau mengirimkan pesan bahwa pasangan ini memiliki banyak kelebihan

sebagaimana direpresentasikan oleh kata “mulia” itu sendiri yakni baik, jujur, berakhlak dan sejenisnya.

Terakhir, pasangan H. Abubakar Ahmad dan Kisman Pangeran menggunakan singkatan OK, merujuk pada nama *Ompu* dan Kisman. *Ompu* merupakan panggilan akrab Abubakar Ahmad sejak menjabat bupati sebelumnya yang dalam bahasa Bima berarti “kakek” atau “sesepuh”. Sebutan “*ompu*” dipilih tidak sekadar untuk menggambarkan kenyataan usia yang secara kebetulan Abubakar Ahmad merupakan calon yang paling tua (72 tahun) tapi, sebagaimana yang sering terjadi dalam dunia politik, juga upaya untuk membangun “pencitraan” guna meraih simpati dan dukungan publik. Dalam konteks ini, pilihan kata “*ompu*” seolah hendak menegaskan bahwa yang bersangkutan lebih ‘layak’ dipilih dibandingkan pasangan calon lainnya karena “lebih berpengalaman”, “lebih senior” dan “lebih tahu”, apalagi sebelumnya yang bersangkutan pernah menjadi bupati selama hampir 2 periode. Dengan sejumlah kelebihan tersebut yang bersangkutan akan dipandang lebih kompeten untuk dipilih sebagai kepala daerah sekaligus mampu memecahkan berbagai masalah di daerah. Tetapi di sisi lain penggunaan singkatan OK (oke, okey dalam bahasa Inggris) oleh pasangan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kesiapan untuk melaksanakan amanah rakyat jika sekiranya nanti diberi kesempatan untuk memimpin daerah.

C. Visi (Pendidikan) Calon Bupati Dompu

Untuk memperkenalkan diri maupun meraih simpati publik, ternyata tidak seluruh Paslon bupati Dompu secara eksplisit menyampaikan atau mencantumkan visi dan misi mereka baik melalui alat peraga kampanye, publikasi, saat kampanye maupun dalam sesi debat antarkandidat bupati. Dari keempat Paslon, hanya Paslon Syafruddin Yasin dan Rafiuddin H. Anas (*Lamba Rasa*) dan pasangan H. Mulyadin dan Kurniawan Ahmadi (MULYA) yang secara resmi mencantumkan visi dan misinya, terutama melalui alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, stiker, dan pamflet. Pasangan Syafruddin Yasin dan Rafiuddin H. Anas (*Lamba Rasa*) memiliki visi “Terwujudnya Dompu yang unggul, sejahtera, maju, religius dan berdaya saing”. Sedangkan misi adalah (1) mewujudkan pemerintahan yang unggul dalam pelayanan publik (2) membangun masyarakat sejahtera melalui peningkatan perekonomian (3) maju dalam kualitas hidup, religius dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya serta menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing dalam bingkai *nggahi rawi pahu*¹.

¹ *Nggahi rawi pahu* merupakan motto atau slogan resmi Pemda Kabupaten Dompu yang tertera dalam lambang daerah Dompu. Dalam bahasa Bima-Dompu secara harfiah *nggahi* berarti perkataan, *rawi*=perbuatan, dan *pahu*=bukti perbuatan. Jadi, motto ini mengandung pengertian tentang pentingnya akan satunya kata dengan perbuatan.

Pasangan H. Mulyadin dan Kurniawan Ahmadi (MULYA), mengusung slogan “Bangga Bangun Desa” (dan belakangan ditambah menjadi “Menata Kota” sehingga menjadi “Bangga Bangun Desa, Menata Kota”). Visi pasangan ini adalah: “Terwujudnya masyarakat Dompu yang maju, mandiri dan religius dengan dinafasi semangat *Mbolo Weki*” (gotong royong). Misi pasangan ini adalah: (a) meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi (b) mengembangkan pendidikan dan teknologi yang bermutu dan berorientasi pasar (c) peningkatan derajat kesehatan masyarakat (d) melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik (e) peningkatan upaya penegakkan hukum (f) meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam.

Sedangkan pasangan H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin (HBY-Arif) mengusung visi maupun misi dalam beberapa kata saja, yakni visi: “Mandiri dan Religius” dan misi “Membuat Masyarakat Dompu Mampu Membayar”. Kendati mungkin dimaksudkan agar lebih sederhana dan mudah diingat oleh publik, namun secara teoretis visi Paslon ini lebih lepat disebut sebagai slogan, sedangkan rumusan misinya justru lebih cocok sebagai visi meski secara tata bahasa belum menjadi kalimat yang sempurna karena tidak memiliki predikat. Sementara pasangan H. Abubakar Ahmad dan Kisman Pangeran (OK) bahkan tak memiliki visi dan misi tapi langsung mengacu pada program kegiatan yakni (1) siap mengembalikan program pendidikan dan kesehatan gratis (2) menaikkan tunjangan kinerja PNS (3) menaikkan gaji honorer daerah (4) memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap (5) menaikkan gaji pegawai sukarela, Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu Daerah, guru PAUD, guru TK, dan guru daerah terpencil (6) membagi pakaian dinas gratis tiap tahun (7) memberi gaji untuk guru ngaji, marbot, dan ketu RT/RW (8) menaikkan harga jagung dan gabah (9) bantuan untuk nelayan (10) pemberian modal untuk pedagang bakulan (11) memajukan dunia pariwisata.

Dalam kampanye di Lapangan Bola Desa Ranggo Kec. Pajo tanggal 19 September 2015, pasangan HBY-Arif tidak secara spesifik mengungkapkan program kerja di bidang pendidikan. Sebagai petahana, pasangan ini banyak menyinggung sejumlah capaian pada periode pemerintahan sebelumnya. Di bidang pertanian pasangan ini menyebut misalnya (1) pembukaan lahan baru untuk pertanian khususnya jagung (2) pemberian bibit jagung gratis untuk para petani (3) penyediaan kebutuhan pupuk (4) bantuan pembangunan tambak rakyat (5) pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) (6) penerbitan sertifikat tanah gratis seluas 16.000 persil tanah tegalan. Di bidang pembangunan infrastruktur pasangan calon ini menyebut capaian

seperti (a) pembangunan Dam Rababaka Kompleks senilai 1 triliun rupiah yang akan mengairi lahan di Kecamatan Woja dan Kecamatan Manggelewa (b) pembangunan dan beroperasinya Pabrik Tebu di desa Doropeti Kecamatan Pekat, beroperasinya perusahaan tambang PT. Sumbawa Timur Maining di Kecamatan Hu’u, serta pabrik pengolahan jagung di Kecamatan Manggelewa.

Dari sektor ekonomi pasangan HBY-Arif juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Dompu dari 21% (2010) menjadi 14% (2015). Di sisi lain daya beli masyarakat Dompu (pendapatan perkapita) meningkat menjadi urutan pertama dari 8 kabupaten/kota se NTB dalam lima tahun terakhir. Di bidang birokrasi pemerintahan pasangan ini juga menjanjikan akan segera mengangkat sejumlah pegawai honorer daerah kategori-2 (K-2). Pasangan ini memandang, karena tiap tahun terdapat ratusan sarjana maka tidak mungkin seluruhnya dapat ditampung dalam birokrasi pemerintahan. Karena itu pasangan ini berpandangan bahwa masuknya investasi swasta di Dompu melalui beroperasinya sejumlah pabrik dan perusahaan tambang dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja baru bagi para sarjana.

Dalam kampanye di desa nelayan, desa Jambu Kecamatan Pajo tanggal 9 September 2015 pasangan MULYA banyak menyampaikan program yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan fasilitas dan sarana untuk nelayan dan petani seperti pengadaan perahu, jaring tangkap, mesin ketinting, pelabuhan, Tempat Pendaratan Ikan (TPI), pembangunan pabrik es dan lain-lain. Di bidang pertanian, pasangan MULYA menjanjikan pengadaan sumur bor untuk meningkatkan produktivitas petani, pembangunan infrastruktur seperti pembangua jalan lingkungan dan jalan usaha tani. Di bidang sosial budaya menjanjikan pembangunan fasilitas olahraga, santunan anak yatim, guru mengaji dan marbot masjid, serta pemberian modal usaha yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp 4 juta perorang khususnya untuk kaum ibu yang membuka usaha kecil/bakulan. Pasangan MULYA melalui Kurniawan Ahmadi menjanjikan bahwa dengan proyeksi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 1,18 trilyun pasangan MULYA akan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis. Kurniawan Ahmadi memproyeksikan bahwa selama setahun Kesehatan Gratis dapat melayani 300 orang perdesa serta satu unit mobil ambulans sehingga jika 300 orang perdesa dikalikan 90 desa maka akan membutuhkan dana sebesar Rp 1,5 milyar, sedangkan mobil ambulans desa dialokasikan 15 unit pertahun sehingga menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 milyar pertahun. Sementara untuk warga miskin pasangan ini menjanjikan fasilitas BPJS Miskin.

Di bidang pendidikan Kurniawan Ahmadi menyampaikan keprihatinannya terutama terhadap

nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang hanya digaji Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan. Jumlah GTT di Kabupaten Dompu dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SMA berjumlah 2.605 orang. Jika terpilih MULYA menjanjikan gaji GTT minimal Rp 300 ribu perbulan dengan alokasi APBD Rp 1 milyar. Kurniawan Ahmadi juga menyatakan keprihatinannya terhadap mutasi guru yang kental dengan nuansa politis, sehingga menyebabkan distribusi guru yang timpang dan hanya berkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sejumlah sekolah di wilayah pinggiran justru kekurangan guru. Di beberapa wilayah seperti kecamatan Manggelewa misalnya, sejumlah SD hanya diisi 2-3 guru terdiri atas guru agama dan guru olahraga saja. Di sebagian besar sekolah kontribusi GTT sangat besar (sekitar 80%) dibandingkan guru PNS yang berjumlah 2.650 orang.

Kurniawan Ahmadi menyatakan bahwa jika pada zaman Bupati Syaifurrahman tahun 2009 dengan PAD yang hanya Rp 514 milyar saja berani memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mengapa sekarang dengan PAD sebesar Rp 619 milyar malah tidak ada? Dia menyatakan bahwa pasangan MULYA mengusung slogan “Membangun Desa Menata Kota” didasari kesadaran bahwa “desa adalah lapisan terbawah kesejahteraan masyarakat. Ibarat pohon, desa adalah akar. Jika akarnya tidak disiram maka daun-daunnya akan layu”. Sementara Cabup Mulyadin menyatakan keprihatinannya atas rendahnya harga jual udang maupun hasil pertanian seperti jagung. Dia menjanjikan akan memperjuangkan stabilitas harga serta memfasilitasi pembentukan asosiasi nelayan dan petani untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Mulyadi juga menawarkan semacam Kartu Jakarta Pintar (KJP) ala (bekas) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang dapat digunakan masyarakat untuk ditukarkan dengan berbagai kebutuhan masyarakat seperti mesin ketinting, sumur bor dalam dll yang akan berlaku selama masa pemerintahannya. Mulyadin juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik seperti jagung dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pasar dan fasilitas lainnya tapi juga harus membangun aspek sosial budaya. Karena itu dia mencanangkan program “Magrib Mengaji” serta meluncurkan Balai Mengaji di 8 desa. Program “Magrib Mengaji” dimaksudkan agar masyarakat terutama anak-anak hendaknya mengaji setelah salat Magrib baik di rumah maupun di masjid.

Mulyadin juga menjanjikan perubahan dalam pelayanan pemerintahan serta hendak membangun demokrasi yang bermartabat dengan menghilangkan politik uang dalam tata pemerintahannya. Selama ini, menurutnya, tata pemerintahan sudah sangat diwarnai politik uang sejak dari jenjang terendah seperti pemilihan Kadus dan Kades hingga

pengangkatan pejabat kepala dinas. Praktik tersebut sudah terjadi di Dompu sejak 15 tahun terakhir. Di bidang pendidikan, Mulyadin menjanjikan akan menaikkan gaji GTT dari Rp 100 ribu-150 ribu sebulan menjadi Rp 300 ribu perbulan. “Jika gaji GTT masih Rp 100-150 ribu perbulan maka untuk apa dilanjutkan?” sambil menyindir slogan petahana paslon HBY-Arif yang mengusung jargon “Lanjutkan!”. Mulyadin juga menjanjikan akan mengangkat guru-guru mengaji menjadi tenaga kontrak daerah.

Sementara itu, dalam Rapat Terbatas di Desa Jambu Kec. Pajo tanggal 29 September 2015 Paslon *Lamba Rasa* menjanjikan perbaikan infrastruktur nelayan seperti rehabilitasi pelabuhan serta bantuan untuk nelayan seperti sampan. Sedangkan di bidang pendidikan menjanjikan bantuan perlengkapan sekolah (buku, seragam sekolah). Anggota Tim Kampanye *Lamba Rasa* Ikhwayuddin AK (juga Ketua Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Dompu) mempertanyakan mengapa pendidikan (di jenjang pendidikan dasar dan menengah) dan kesehatan harus dibiayai lagi masyarakat, sedangkan sebelumnya pendidikan dan kesehatan gratis sudah berjalan. Dia menyatakan bahwa jika terpilih maka Paslon *Lamba Rasa* memastikan selama lima tahun memegang pemerintahan maka tidak akan ada lagi masyarakat Dompu yang putus sekolah maupun tidak mampu membayar biaya berobat dengan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Dia bahkan mengklaim bahwa kondisi kehidupan masyarakat Dompu saat ini diazab oleh Allah. “Allah telah mengazab kita karena kita telah salah memilih pemimpin. Apa bukti azab itu? Kalau dulu kita tak perlu bayar sekolah, sekarang kita bayar maka itu adalah azab. Kalau dulu kita berobat gak perlu bayar, sekarang harus bayar maka itu pun adalah azab Allah”.

Dia juga banyak mengeritik kebijakan pembangunan Pemda yang lebih berorientasi proyek-proyek fisik seperti pembangunan gedung Paruga Samakai hanya karena Pemda mendapat konsesi 10% dari kontraktor daripada pembangunan dam-dam yang lebih dibutuhkan oleh rakyat. Dia juga menjanjikan jika paslon *Lamba Rasa* memenangkan Pilkada akan menyediakan bantuan modal maupun membuka lapangan kerja untuk para pemuda maupun kaum ibu sehingga mereka memiliki usaha produktif dan tidak perlu menjadi TKI/TKW seperti yang berlangsung selama ini. Paslon *Lamba Rasa* juga akan memberikan bantuan untuk nelayan maupun petani seperti perahu dan alat tangkap. Sementara Cabup Syarifuddin Yasin menjanjikan, jika dirinya terpilih maka akan mengunjungi masyarakat setiap saat. Dia juga meyakinkan bahwa dirinya mengikuti pencalonan bupati Dompu bukan untuk mencari kekayaan pribadi melainkan untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Dompu. Dia juga mengklaim

memiliki akses untuk mendapatkan sumber-sumber dana di Pemerintah Pusat (Jakarta).

Sementara itu, Cawabup Paslon OK Kisman dalam kampanye di Kelurahan Monta Kec. Woja tanggal 1 Desember 2015 menyatakan pasangan OK bertekad mengembalikan program pendidikan dan kesehatan gratis sebagaimana dijalankan pada saat Ompu menjadi Bupati Dompu periode sebelumnya. Khusus di bidang pendidikan program pendidikan gratis bahkan akan diperluas hingga tingkat SMA dibandingkan sebelumnya dari jenjang SD sampai SMP. Begitu juga untuk anak-anak kurang mampu yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (PT), akan dibiayai asalkan memiliki prestasi akademik maupun prestasi nonakademik yang baik. Begitu pula untuk para guru yang berprestasi tapi hendak menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi akan dikuliahkan secara gratis. Paslon OK mengkritik penghapusan program pendidikan dan kesehatan karena simpulan yang keliru yakni masyarakat Dompu sudah sejahtera (kaya).

Kisman memastikan bahwa pihaknya juga akan mengharamkan penyuaipan dalam pengangkatan kepala sekolah seperti yang terjadi selama ini yang ditengarai melakukan penyuaipan antara Rp20-30 juta. Pengangkatan kepala sekolah akan dilakukan berdasarkan prinsip senioritas. Paslon OK akan memberikan gaji kepada guru honor Rp 900 ribu seperti di zaman *Ompu* dahulu. "Sekarang gaji guru honor malah diturunkan menjadi Rp700 ribu," tukas Kisman. OK menjanjikan gaji guru honor Rp 1 juta sebulan sedangkan Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Tetap Yayasan (GTY), guru TK, guru PAUD, kader Posyandu, guru *ngaji*, dan ketua RT diberi gaji Rp500 ribu. Sedangkan untuk birokrasi, pasangan OK akan mengembalikan program pembagian pakaian dinas secara gratis. Pihaknya juga menjamin tidak ada praktik suap dalam tes CPNS maupun perekrutan pegawai honor daerah.

Bila dicermati maka terdapat beberapa fakta menarik tentang isu dan kebijakan pendidikan dalam konteks kampanye Pilkada Dompu. *Pertama*, tidak seluruh Paslon merumuskan visi, terlebih memiliki visi pendidikan, secara sistematis dan komprehensif. Absennya bidang pendidikan dalam visi (sebagian) para Paslon bupati tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan seolah menjadi sektor yang diabaikan dan dianggap tidak penting dalam keseluruhan rancang-bangun pembangunan di daerah. Sebaliknya, isu dan kebijakan di bidang-bidang ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan birokrasi jauh lebih mendapat perhatian. Secara teoretis hal tersebut dapat dimaklumi karena, kendatipun kebijakan pendidikan disadari sangat penting bagi transformasi sosial individu dan masyarakat baik secara ekonomis maupun aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan, namun

kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, budaya, maupun ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan Supandi dan Sanusi (1988: 20) bahwa proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu *budaya politik* dan *struktur sosial-ekonomi*. Dalam konteks budaya politik, terdapat tiga budaya politik yaitu kultur politik parokial (*parochial political culture*), budaya politik subjektif (*subjective political culture*), dan budaya politik partisipasi (*participant political culture*). Di negara dengan kultur politik parokial, kontrol negara dalam pembuatan kebijakan sangat dominan, sedangkan hak warga negara untuk berpartisipasi tidak ada sama sekali. Dalam budaya politik subjektif, kendati terdapat ruang partisipasi publik dalam pembuatan namun masih dalam skala terbatas. Adapun pada budaya politik partisipasi, publik memiliki kesadaran informasi dan politik yang cukup tinggi sehingga terlibat secara penuh dalam pembuatan kebijakan, termasuk ikut memengaruhi pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dan hasil kebijakan berbeda dalam sistem demokratis dan otoriter.

Dalam kaitan dengan faktor kedua yakni struktur sosial-ekonomi, maka kondisi ekonomi masyarakat ikut memengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam suatu negara atau daerah yang masih didera oleh kemiskinan ekonomi, misalnya, maka upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap pendidikan tidaklah mudah. Di tingkat antarnegara, kebijakan pendidikan juga memperlihatkan nuansa yang berbeda misalnya, antara negara maju dan negara berkembang. Jika di sebagian besar negara maju pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana publik (Sirozi, 2005: 17), maka di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi negara bersangkutan. Seperti dikemukakan Tilaar (2008: 138) bahwa keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki menyebabkan kebijakan pendidikan di negara-negara tersebut seringkali dikalahkan oleh masalah lain seperti kelaparan, bencana, dan kemiskinan.

Oleh sebab itu sebagai suatu keputusan dan tindakan yang bersifat khas, baik karena faktor ekonomi, politik, dan ideologi, maka kebijakan pendidikan pada setiap negara cenderung memperlihatkan wajah yang berbeda. Di negara-negara maju, kebijakan pendidikan berada pada posisi yang setara bahkan, dalam batas tertentu, lebih tinggi daripada kebijakan publik lainnya, sedangkan di negara-negara miskin, kebijakan pendidikan hanya menjadi subordinasi dari kebijakan lainnya seperti kebijakan ekonomi, militer, sosial dan lainnya. Karena itu, di negara seperti ini melahirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada

pendidikan menjadi tantangan berat karena tidak saja berkaitan dengan komitmen politik dan kepemimpinan tapi juga harus bersaing dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat lainnya.

Dalam kampanye Pilkada Dompu, kecilnya perhatian para Paslon terhadap kebijakan pendidikan dalam derajat tertentu dapat dipahami dari perspektif di atas. Sebagai daerah yang masih didera oleh berbagai kemiskinan dan keterbelakangan maka 'wajar' bila para Paslon belum menjadikan isu pendidikan sebagai isu utama dalam kampanye-kampanye mereka. Sebaliknya, fokus isu para Paslon lebih besar pada persoalan-persoalan kongkret yang dihadapi oleh masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pangan, kesejahteraan ekonomi, lapangan kerja serta pembangunan infrastruktur. Isu-isu seputar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dipandang lebih populis dan karenanya secara politik lebih menguntungkan dibandingkan dengan isu pendidikan yang relatif dipandang 'mewah'. Seperti telah dikemukakan, hingga tahun 2005 angka kemiskinan di kabupaten Dompu masih cukup tinggi yakni mencapai 57.531 jiwa (27,87%) dari total penduduknya 206.414 jiwa dan karenanya berada di urutan kedua sebagai daerah paling miskin dari sembilan kabupaten/kota di NTB. Tidak mengherankan jika sampai tahun 2007 IPM kabupaten Dompu berada di urutan 5 tingkat Provinsi NTB dan urutan 424 secara nasional.

Kendati demikian, tidak berarti bahwa kemiskinan ekonomi menjadi satu-satunya alasan bagi suatu daerah untuk tidak menjadikan kebijakan pendidikan sebagai arus-utama (*mainstream*) kebijakan kepala daerah. Sebab hal itu sangat tergantung pada visi dan kepedulian pemimpin bersangkutan. Mengacu pada Tilaar dan Nugroho (2008) bahwa jika kebijakan pendidikan dianggap atau diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan publik menyebabkan kebijakan pendidikan tidak berbeda dengan aspirasi kekuasaan atau aspirasi politik dari penguasa. Akibatnya, makna "pendidikan" itu sendiri direduksi menjadi subbagian dari proses pembangunan atau proses perubahan. Pendidikan tidak dinilai sebagai penentu perubahan, atau bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat, dalam kondisi ada atau tidak ada kekuasaan politik. Pendidikan sebagai sebuah fakta kemanusiaan dan peradaban dapat dengan mudah diabaikan (Tilaar dan Nugroho, 2008: 306-307).

Jika kebijakan pendidikan dipandang sebagai bagian dari kebijakan pembangunan lainnya maka pendidikan pun akan diperlakukan sama dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan bidang ekonomi, sosial, militer dan lain-lain. Dalam konteks ini, sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah pendidikan juga sering "dipaksa" menyesuaikan diri dengan pola-pola administratif umum dan norma-

norma yang berlaku. Akibatnya, "pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah seperti pemerintah membiayai dan mengontrol bidang-bidang lainnya seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial" (Sirozi, 2005: 17). Padahal sebagai upaya humanisasi (*humanizing*), kebijakan pendidikan memerlukan pola pendekatan dan perlakuan yang juga manusiawi. Pada kampanye Pilkada Dompu terlihat bahwa visi dan kebijakan pendidikan dari Paslon hanya sekadar bagian terkecil dari isu-isu utama dalam kampanye-kampanye mereka.

Persoalan *kedua*, adalah isu dan kebijakan pendidikan dari Paslon cenderung terkesan instan dan belum bersifat strategis seperti pelayanan pendidikan gratis, penyediaan perlengkapan sekolah, menaikkan tunjangan guru honorer, pemberian beasiswa, serta mengarahkan lulusan agar terserap dalam pabrik maupun perusahaan tambang. Meskipun demikian, ada juga Paslon yang menyoroti ketimpangan distribusi guru-guru di daerah perkotaan dan pedesaan, kendatipun belum dilengkapi dengan pemetaan di tiap kecamatan serta data-data yang memadai. Munculnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang bersifat instan tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa pembuatan kebijakan-kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, seringkali tidak berdasarkan analisis kebijakan yang memadai. Padahal dengan memanfaatkan hasil analisis kebijakan yang telah ada maka di samping terhindar dari pembuatan kebijakan yang keliru juga dapat menghemat berbagai sumberdaya.

Kendati para pembuat kebijakan menyadari bahwa analisis kebijakan diperlukan dan penting dalam setiap pembuatan kebijakan, namun seringkali hal tersebut tidak dilakukan. Sebaliknya, pembuat kebijakan cenderung menggunakan cara-cara pragmatis dan instan untuk memecahkan masalah publik meski dengan resiko mengalami distorsi, termasuk dengan menduplikasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Hal itu selain karena alasan biaya, kegiatan analisis juga membutuhkan waktu yang relatif lama, sementara pemerintah membutuhkan suatu kebijakan yang bersifat "segera" (Lindblom, 1980).

Bila dicermati maka isu dan kebijakan-kebijakan pendidikan dalam kampanye dari para Paslon bupati Dompu tidak bersifat strategis dan komprehensif. Bahkan kebijakan pendidikan gratis misalnya, sekadar menduplikasi kebijakan nasional karena hal itu merupakan amanat dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sehingga penerapan kebijakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai 'kemurahan hati' atau bentuk keberpihakan pemimpin di daerah terhadap dunia pendidikan. Dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” dan pada ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Bahkan secara spesifik, dalam kaitannya dengan pendanaan pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Dengan demikian, keharusan untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang murah dan berkualitas, terutama di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP/ sederajat), sudah merupakan *sine quo non*, mutlak dan inheren dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di luar hal itu, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat merupakan amanat konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dapat dikatakan bahwa secara umum kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditawarkan para Paslon dalam kampanye Pilkada Dompu masih berkuat pada hal-hal yang bersifat fisik atau finansial seperti pendidikan gratis, penyediaan perlengkapan sekolah, pemberian beasiswa dan sejenisnya. Padahal sebagaimana diingatkan Arcaro (1997: 2) bahwa kunci peningkatan mutu pendidikan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan dana. Arcaro menolak pandangan bahwa jika dana telah tersedia dalam jumlah cukup secara otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan. Padahal pencapaian mutu tersebut ditentukan oleh kualitas personal yang ada baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun komite sekolah/dewan pendidikan dalam membangun kerjasama bagi kemajuan sekolah. Masih menurut Arcaro (1997: ix) bahwa keberhasilan reformasi di bidang pendidikan mengharuskan pelibatan semua pemangku kepentingan dan harus dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial secara keseluruhan. Sejalan dengan itu Beeby (1982: 4) juga mempertanyakan setiap kebijakan pendidikan yang hanya mengandalkan pertimbangan finansial:

“Memang tak banyak perubahan bisa terjelma tanpa uang tapi apabila kita menggantungkan segala-galanya hanya pada uang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan yang juga meminta pengertian kita yang mendalam terhadap motif-motif, kebiasaan serta sikap manusia, maka kita hanya akan memperoleh sesuatu yang keropang tanpa isi”.

Pada kampanye Pilkada Dompu, terlihat bahwa para Paslon belum menyentuh aspek-aspek kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif, sistematis dan terintegrasi. Misalnya tentang peningkatan kapasitas (*capacity building*) tenaga pendidik dan

kependidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, kepastian dalam jenjang karir, pembatasan masa jabatan kepala sekolah, penggabungan sejumlah sekolah yang kekurangan murid, penyediaan bus sekolah, penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah dan lain-lain. Sebagian kecil isu strategis pendidikan tampaknya sudah muncul dalam kampanye Paslon seperti persoalan ketimpangan distribusi guru antarwilayah (sebagaimana dikemukakan Paslon MULYA) maupun tekad menghilangkan praktek ‘penyerahan upeti’ yang ditengarai terjadi dalam pengangkatan kepala sekolah (Paslon OK), namun juga jelas kiranya bahwa berbagai persoalan mendasar pendidikan di Dompu sebagaimana dikemukakan di atas belum tersentuh.

Masalah peningkatan kemampuan mengajar guru misalnya, merupakan salah satu persoalan yang luput dan diabaikan dalam wacana kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Padahal sudah lama menjadi rahasia umum bahwa seorang pegawai negeri di Indonesia, termasuk guru, rata-rata hanya mendapatkan program-program pelatihan peningkatan kemampuan profesionalnya hanya sekali selama 20 tahun, belum lagi guru-guru di sekolah swasta. Hal tersebut berakibat pada lemahnya kemampuan profesional guru dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian juga dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah. Meski di Dompu dalam satu tahun terakhir ini sudah mulai dilakukan pembenahan berupa pelatihan Cakep (calon kepala sekolah), namun kebijakan semacam itu belum ditindaklanjuti secara serius. Sebagian kalangan pendidikan menganggap program pelatihan Cakep hanya ‘formalitas’ saja karena akhirnya tetap ditentukan oleh faktor kedekatan, pendekatan, uang dan lobi-lobi politik. Di kalangan pelaku pendidikan di Dompu berkembang beberapa istilah untuk menyindir kecenderungan ini misalnya, bahwa untuk mendapatkan jabatan seperti kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kecamatan tidak hanya ditentukan oleh “garis tangan” tapi juga “jabat tangan dan buah tangan”, atau dalam istilah lokal harus memiliki “*pi*” dan “*pa*”. Dalam bahasa Bima “*Pi*” adalah akronim “*piti*” (uang) dan “*pa*” adalah “*pata*” (kenalan). Artinya, kepastian jenjang karir kependidikan tidak semata ditentukan oleh kompetensi tapi juga karena faktor uang dan pertemanan dan koneksi dengan sumber-sumber kekuasaan. Di sisi lain, juga berkembang asumsi keliru sebagian pelaku pendidikan di Dompu yang memandang seolah-olah jabatan kepala sekolah merupakan pencapaian tertinggi dalam karir seorang pendidik.

Akibatnya, kendati regulasi menetapkan bahwa jabatan sebagai kepala sekolah hanyalah ‘tugas tambahan’, namun asumsi keliru semacam ini sudah

telanjur berkembang sehingga berimplikasi pada pandangan bahwa jabatan kepala sekolah seolah menjadi simbol prestise dan status sosial dan, karenanya, harus dikejar dan diperebutkan dengan segala cara, termasuk dengan upaya praktek penyuaipan sebagaimana ditengarai sebagian kalangan selama ini. Sinyalemen ini muncul, salah satunya, disebabkan ketidakjelasan mekanisme pengangkatan dalam jabatan kepala sekolah. Akibatnya, setiap kali dilakukan promosi dan mutasi birokrasi seringkali menimbulkan 'kegaduhan' bahkan 'keguncangan' di tengah publik karena selalu dipersepsi dalam kerangka 'hukuman' dan 'anugerah'. Dipersepsi sebagai 'hukuman' (*punishment*) jika jabatan baru tersebut tergolong 'kering' secara ekonomis atau posisinya lebih rendah dari sebelumnya. Sebaliknya, akan dipersepsi sebagai anugerah dan keberuntungan jika seseorang mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi, terlebih lagi jika mengalami 'lompatan' jabatan dari biasanya. Sebaliknya, jika mekanisme tersebut didasarkan pada indikator-indikator yang transparan dan akuntabel maka timbulnya ekses-ekses yang tidak produktif tersebut dapat dihindarkan.

Di Indonesia beberapa contoh baik (*best practice*) dalam terobosan dan inovasi-inovasi kebijakan pendidikan telah dilakukan misalnya, di Kabupaten Jembrana, sebuah kabupaten termiskin di Bali. Sebagaimana ditemukan Nugroho (2008) bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil melakukan beberapa inovasi dalam kebijakan pendidikan seperti penggabungan beberapa sekolah (termasuk penggabungan sejumlah kantor pemerintah) maupun pembatasan masa jabatan kepala sekolah. Di Jembrana jabatan kepala sekolah hanya berlaku dua periode dan setelah itu menjadi guru biasa karena sesuai dengan regulasi nasional bahwa jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan, sedangkan tugas pokoknya adalah tetap sebagai guru. Penegakkan aturan semacam ini diperlukan untuk mencegah timbulnya asumsi keliru sebagaimana dikemukakan di atas bahwa jabatan kepala sekolah seolah menjadi lambang prestise dan status sosial seseorang. Lebih dari itu, penegakkan regulasi ini dilakukan karena berdasarkan sejumlah temuan bahwa ternyata banyak kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru senior yang tidak lolos dalam uji kompetensi sertifikasi.

Berdasarkan survei Pengurus Besar PGRI pada 2009 misalnya, dari 11.972 guru peserta sertifikasi, hanya 39 persen yang dinyatakan lulus, sedangkan 61 persen tidak lulus (*Kompas*, 8 April 2009). Termasuk yang tidak lulus tersebut adalah pengawas, kepala dan guru-guru senior. Kegagalan pengawas dan kepala sekolah dalam sertifikasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan karena salah satu persyaratan sertifikasi adalah mendapatkan persetujuan dari atasannya. Jika pengawas dan kepala sekolah saja tidak lulus sertifikasi, lantas bagaimana

mungkin keduanya sebagai atasan para guru dapat memberikan persetujuan terhadap guru-guru yang akan disertifikasi. Demikian pula dengan problem rendahnya kinerja dan produktivitas guru-guru yang sudah lulus sertifikasi masih memprihatinkan baik menyangkut pola kerja, pembelajaran, atau peningkatan kemampuan diri (*Kompas*, 25 November 2009). Survei PGRI juga menunjukkan bahwa kinerja guru bersertifikasi cenderung rendah dan sebaliknya produktivitas mereka tinggi saat mengikuti sertifikasi. Survei PGRI yang dilakukan pada 16 dari 28 provinsi tentang kinerja guru-guru yang sudah bersertifikasi ternyata menunjukkan hasil yang mengecewakan (*Kompas*, 7 Oktober 2009). Dengan demikian, kenaikan tunjangan profesi ternyata tidak secara otomatis meningkatkan kinerja guru. Hal itu karena sertifikasi disederhanakan sekadar masalah remunerasi/kesejahteraan. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan remunerasi hanya berpengaruh sekitar tiga bulan terhadap kinerja seseorang (Suryanto, 2007). Hal ini semakin menegaskan bahwa masalah perbaikan mutu pendidikan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Dengan kata lain, keterbatasan anggaran bukanlah faktor tunggal dalam kebijakan perbaikan mutu pendidikan. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan pendidikan seharusnya memberikan porsi lebih pada peningkatan sumberdaya manusia karena, sebagaimana ditekankan oleh Werther&Davis (1985: 6) "ia merupakan elemen penting dalam setiap organisasi dan menentukan kualitas kehidupan masyarakat baik berupa barang maupun jasa." Dalam konteks pendidikan peningkatan kualitas sumberdaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya guru dan kepala sekolah sangat menentukan kinerja pendidikan itu sendiri.

Demikian juga dengan upaya Pemkab Jembrana untuk menggabungkan sejumlah sekolah yang dianggap tidak efisien sehingga menghasilkan penghematan anggaran. Pada 2001-2002 dari penggabungan 22 sekolah dasar menghasilkan efisiensi anggaran Rp 3,3 milyar (Nugroho, 2008: 119). Tentu saja inovasi kebijakan pendidikan semacam ini sangat ditentukan oleh keberanian kepala daerah maupun dukungan pemangku kepentingan lain seperti DPRD, Dewan Pendidikan, LSM dll. Dalam kasus Jembrana, sebagaimana dikemukakan Nugroho (2008) bahwa faktor keberhasilan sejumlah inovasi kebijakan pendidikan di Jembrana adalah pada faktor kekuatan kepemimpinan (*strong leadership*) Bupati Jembrana Winasa.

Dalam konteks Dompus masalah penggabungan sekolah yang tidak efisien juga sangat mendesak dilakukan. Tapi rupanya isu ini tergolong sensitif sehingga cenderung dihindari para Paslon karena dianggap tidak menguntungkan secara elektoral.

Sebab jika isu merger sekolah ini dilakukan tentu akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti bagaimana merelokasi jabatan bagi kepala sekolah, guru, hingga guru honorer pada sekolah yang dimerger. Padahal suara dan dukungan para pelaku pendidikan di tingkat bawah ini dipandang signifikan oleh para Paslon. Selain persoalan efisiensi anggaran, kendala alat transportasi juga merupakan masalah yang sering dihadapi terutama oleh peserta didik khususnya di daerah-daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis maupun demografis dimana sebagian masyarakat Dompu bertempat tinggal secara terpencar-pencar sehingga berpengaruh terhadap kinerja pendidikan (*educational performance*) khususnya dari aspek tingkat kehadiran peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang antisipatif dan progresif untuk memecahkan masalah tersebut, misalnya dengan pengadaan angkutan khusus sekolah. Demikian pula, diperlukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang lebih populis untuk merangsang peningkatan persentase kehadiran peserta didik di sekolah, antara lain kebijakan pengadaan makan siang gratis di sekolah sebagaimana diterapkan di India.

Berbagai inovasi kebijakan pendidikan semacam ini maupun mengadopsi beberapa *best practice* yang ada sangat diperlukan agar wacana-wacana kebijakan pendidikan tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan konvensional (seperti pendidikan gratis) namun mampu melampaui berbagai masalah pendidikan yang muncul di masa mendatang. Di atas semua itu, pendidikan sebagai satu-satunya instrumen yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah bangsa membuktikan bahwa investasi pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing bangsa tersebut. Beberapa studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi (MC Mochan dan Boediono 1992 dalam Fatah 2009). Berdasarkan temuan studi tersebut bahwa keuntungan ekonomi (*rate of return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomis (Fatah, 2009: 79). Secara demikian maka sudah seharusnya kebijakan-kebijakan pendidikan dijadikan arus utama (*mainstream*) dalam rancangan pembangunan di daerah, termasuk dalam kampanye-kampanye politik pemilihan kepala daerah.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, pendidikan belum menjadi isu utama dalam tema-tema kampanye para kandidat yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Dompu 2015; isu-isu pendidikan berada dalam posisi sejajar bahkan---bagi sebagian Paslon---disubordinasikan dengan tema-tema kampanye lainnya seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan ekonomi serta perbaikan kesejahteraan pegawai. **Kedua**, isu kebijakan pendidikan dalam kampanye para Paslon bersifat parsial karena masih berkisar pada perdebatan pendidikan gratis, sedangkan beberapa persoalan nyata pendidikan maupun memunculkan inovasi-inovasi baru di bidang kebijakan pendidikan tidak muncul sama sekali. Memang, ada satu Paslon yang mulai menyoroti ketimpangan distribusi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan, tapi juga jelas masih banyak masalah strategis pendidikan yang belum tersentuh seperti efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perbaikan kualitas sumberdaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun kejelasan dan kepastian dalam jenjang karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketiga, pembenahan kebijakan-kebijakan pendidikan dalam kampanye para Paslon masih sangat kuat menggunakan pendekatan 'kesejahteraan' dalam mengatasi persoalan pendidikan seperti pemberian remunerasi, beasiswa, perlengkapan sekolah dan sejenisnya. Sedangkan persoalan-persoalan etos kerja, budaya dan mental cenderung diabaikan. Dengan kata lain, berbagai persoalan pendidikan cenderung dilihat dengan menggunakan pendekatan kuratif, seolah dengan mengandalkan basis-basis material dapat menyelesaikan masalah pendidikan dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Razik, T&Swanson, A, *Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management*. New Jersey: Prentice-Hall, 1995.
- [2] UNESCO, *Learning to be*. Paris: UNESCO, 1972.
- [3] Tilaar, HAR & Nugroho, R, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [4] Badan Pusat Statistik, *Buku Saku 2008*. Mataram: BPS, 2008.
- [5] Miles, M.B&Huberman, AM, *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, 1985.
- [6] Tim Penyusun KPU Kabupaten Dompu, *Buku Data dan Infografik Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Dompu Tahun 2015*. Dompu: KPU Kabupaten Dompu, 2015.
- [7] Supandi dan Sanusi, A, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1988.

- [8] Sirozi, M, *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- [9] HAR, Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- [10] Lindblom, E, *The Policy-Making Process*. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, 1980.
- [11] Arcaro, S, *Quality in Education: An Implementation Handbook*. New Delhi: Vanity Books International, 1997.
- [12] C.E., Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, terj. BP3K dan YIIS. Jakarta: LP3ES, 1982.
- [13] Nugroho, R, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [14] Suryanto, D, *Transformational Leadership: Menuju Kepemimpinan Unggul*. Bandung: Total Data, 2007.
- [15] Werther, B & Davis, K, *Personnel Management and Human Resources*. Second Edition. Singapore: McGraw-Hill, 1985.
- [16] Fatah, N, *Ekonomi&Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- [17] Pramusinto, A, "Desentralisasi dan Kepemimpinan Inovatif di Indonesia," *Sosiohumaniora*, vol. 12, no. 3, h. 307-308, Nov. 2010.
- [18] Sulistyastuti, R, "Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis," *Kependudukan Indonesia*, Vol. II, No. 2, h. 19, April 2007.
- [19] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [20] Tilaar *Kompas*, 8 April 2009.
- [21] *Kompas*, 7 Oktober 2009. "Kinerja Guru Rendah, Produktivitas Tinggi Saat Mengikuti Sertifikasi".
- [22] *Kompas*, 25 November 2009. "Guru Dituntut Perbaiki Kinerja".
- [23] *Jurnal KPU Kabupaten Dompu*. Edisi Juli-Agustus 2015."7 Kabupaten/Kota di NTB Gelar Pilkada Serentak".
- [24] *Suara KPU*, edisi Maret-April 2015.
- [25] *Inti Rakyat*, 28 September 2015. "OK Tawarkan 14 Program untuk Semua".
- [26] *Inti Rakyat*, 28 September 2015. "Paslon LR Janjikan Kesejahteraan Rakyat".
- [27] *Inti Rakyat*, 28 September 2015. "Membangun Mulai dari Desa".